



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN..... 2

1.1. Latar Belakang..... 2

1.2. Landasan Hukum..... 3

1.3. Maksud dan Tujuan..... 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINKOMINFOTIK..... 8

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinkominfotik 8

2.2. Sumber Daya Dinkominfotik 21

2.3. Kinerja Pelayanan Dinkominfotik..... 25

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinkominfotik 29

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 34

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 34

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 36

3.3. Telaahan Visi, misi Kementrian Kominfo dan Renstra Provinsi 39

3.4. Penentuan Isu – isu Strategis 41

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 42

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinkominfotik..... 42

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 44

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinkominfotik.....44

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDOKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF 45

BAB VII. INDIKATOR KINERJA DINKOMINFOTIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 74

BAB VIII. PENUTUP 76



BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sistem perencanaan strategis sangat diperlukan. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Model perencanaan strategi di Indonesia diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sistem yang menjadi pedoman pengambilan kebijakan pemerintahan di Indonesia. Dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tertulis bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Daerah maupun Pusat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah penjabaran visi misi dari SKPD yang sejalan dengan visi misi Kepala Daerah, dalam hal ini adalah Bupati Kepala Daerah periode 2017 – 2022. Renstra OPD ini juga merupakan suatu bentuk penjabaran pelaksanaan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diatur tata cara pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2012 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah di ubah menjadi Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan SKPD baru di bentuk di tahun 2017. Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Brebes dan Peraturan Bupati Bupati nomor 102 tahun 2016 tentang tugas fungsi dan uraian tugas jabatan structural perangkat daerah Kabupaten Brebes.

Dinas Dinkominfo merupakan gabungan dari subag Humas dari Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Brebes, Bidang Kominfo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Brebes serta Bidang Statistik Bappeda Kabupaten Brebes. Saat ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki 2 Bidang yakni Bidang Komunikasi dan Kehumasan juga Bidang Informatika dan Statistik.

Terkait dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes juga menyusun Renstra OPD sebagai dokumen induk perencanaan kegiatan periode 2017 – 2022 sebagai pedoman agar kegiatan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan tujuan yang akan dicapai pada visi misi yang telah dicanangkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes terpilih.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2003 – 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Brebes 2017-2022 (LDKB Tahun 2018 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 029 Tahun 2016 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017;
26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Bidang Komunikasi;
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
30. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinkominfo Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 adalah memberikan pedoman bagi karyawan Dinkominfo dalam penyusunan rencana prioritas – prioritas kerja tahunan, pelaksanaan pembangunan melalui penjabaran tugas pokok dan fungsi selama lima tahun ke depan dan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Dinkominfo.

Tujuan penyusunan Renstra Dinkominfo Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 adalah untuk meningkatkan kinerja Dinkominfo dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Brebes.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam dokumen Renstra Dinkominfotik Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 ini memuat rencana kerja Dinkominfotik sesuai dengan visi misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes terpilih, yang diuraikan dalam 8 Bab dan 16 Sub Bab sebagai berikut:

Tabel I. Sistematika Penulisan Renstra Dinkominfotik 2018 - 2023

Keterangan	Judul dan Garis Besar Isi
BAB I	PENDAHULUAN
Sub Bab 1.1	Latar Belakang: Memuat latar belakang penyusunan Renstra Dinkominfotik Tahun 2017 – 2022.
Sub Bab 1.2	Landasan Hukum: Memuat landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Renstra Dinkominfotik maupun operasional Dinkominfotik.
Sub Bab 1.3	Maksud dan Tujuan: Pada bab ini dinyatakan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinkominfotik secara singkat dan jelas.
Sub Bab 1.4	Sistematika Penulisan: Secara singkat dipaparkan garis besar isi dari dokumen Renstra Dinkominfotik 2017 – 2022.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINKOMINFOTIK
Sub Bab 2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinkominfotik: Uraian secara jelas tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi Dinkominfotik Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.
Sub Bab 2.2	Sumber Daya Dinkominfotik : Pada sub bab ini diuraikan mengenai sumber daya yang ada dan sumber daya yang dibutuhkan oleh Dinkominfotik.
Sub Bab 2.3	Kinerja Pelayanan Dinkominfotik : Pada sub bab ini ditampilkan kinerja pelayanan sesuai dengan capaian RPJMD 2012 – 2017.
Sub Bab 2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinkominfotik: Pada sub bab ini diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan Dinkominfotik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
BAB III	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sub Bab 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD: Pada sub bab ini diterangkan permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Dinkominfotik.
Sub Bab 3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih: Pada sub bab ini, menelaah visi misi Bupati Brebes yang sekiranya dapat



Keterangan	Judul dan Garis Besar Isi
	dijabarkan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfotik.
Sub Bab 3.3	Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi: Pada sub bab ini, menelaah Renstra dari Kementerian Kominfo, dan Provinsi Jawa Tengah dari sisi kesamaan visi misi dan menerapannya dalam Renstra Dinkominfotik Kabupaten Brebes.
Sub Bab 3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Pada sub bab ini, menelaah konsep keruangan dan konsep lingkungan hidup strategis Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk menyelaraskan program dalam Renstra Dinkominfotik.
Sub Bab 3.5	Penentuan Isu – isu Strategis: Pada sub bab ini disampaikan isu – isu strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinkominfotik.
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Sub Bab 4.1	Visi Misi Dinkominfotik: Pada sub bab ini diuraikan visi misi Dinkominfotik yang secara umum disadurkan dari visi misi Bupati yang sejalan dengan visi misi Kementerian.
Sub Bab 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinkominfotik: Pada sub bab ini diuraikan tujuan dan sasaran dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinkominfotik jangka menengah, disertai penjelasan kuantitatif target.
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan Kebijakan Dinkominfotik : Pada sub bab ini diuraikan strategi dan arah kebijakan Dinkominfotik terkait dengan pelaksanaan visi misi serta penetapan tujuan dan sasaran.
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini dipaparkan rencana program dan kegiatan Dinkominfotik berikut indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada periode tahun anggaran 2017 – 2022.
BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINKOMINFOTIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bab ini diurakan indikator kinerja Dinkominfotik yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang masuk dalam rencana program jangka menengah.
BAB VIII	PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN DINKOMINFOTIK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinkominfotik

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.

1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang Kominfotik;
2. Pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan lingkup tugas di bidang Kominfotik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang Kominfotik;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang Kominfotik
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat :
 - Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

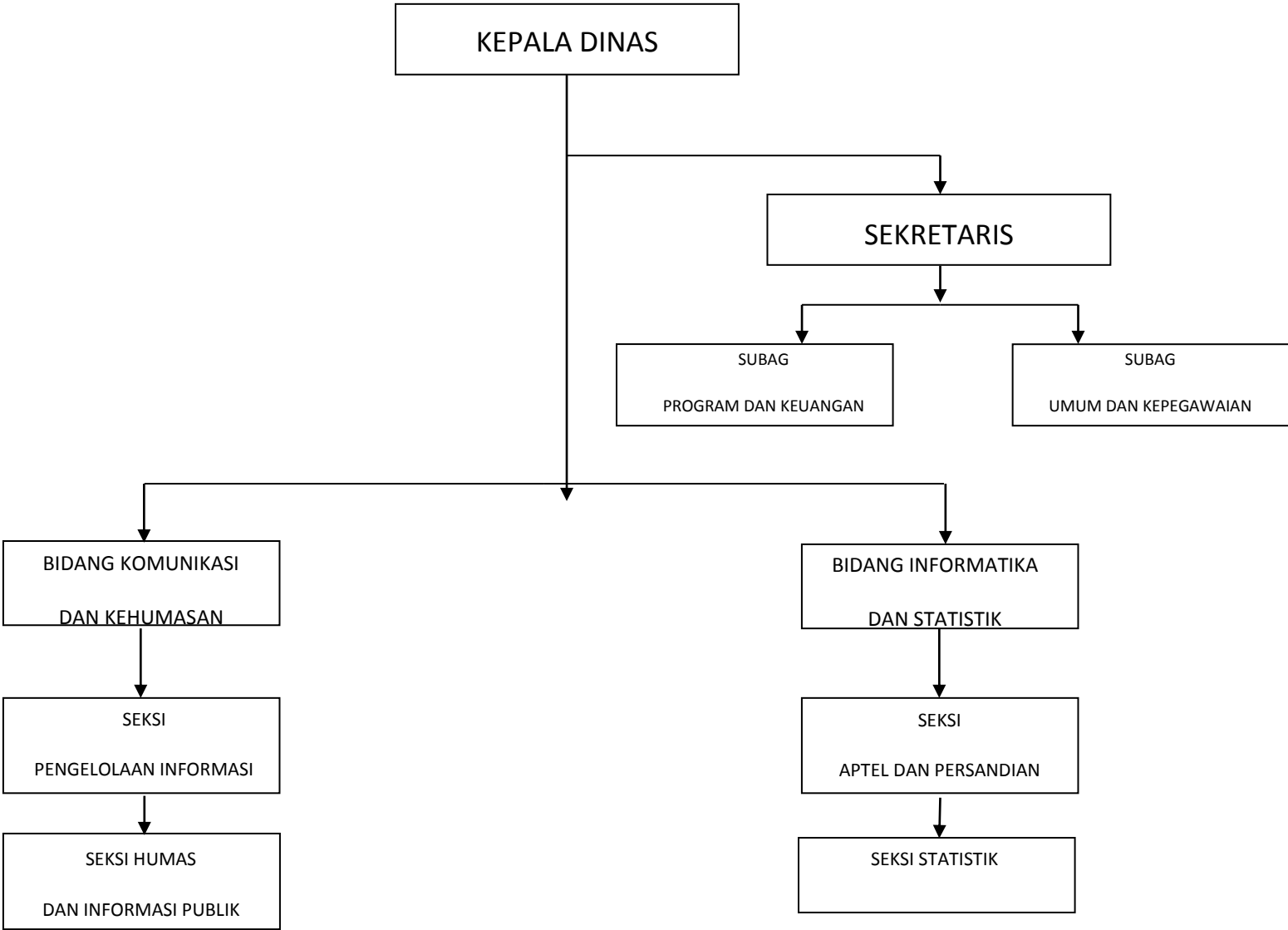
- 3. Bidang Komunikasi dan Kehumasan ;
 - Seksi Humas dan Komunikasi Publik;
 - Seksi Pengelolaan Informasi dan Desiminasi;
- 4. Bidang Informatika dan Statistik ;
 - Seksi Aplikasi Telematika dan Persandian;
 - Seksi Statistik;

Adapun Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Brebes sebagaiberikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinkominfotik Kabupaten Brebes

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BREBES



1) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas dan acuan pelaksanaan tugas; Merumuskan kebijakan di bidang Kominfotik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Kominfotik dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, propinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan; Menditrisbusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; Menyelenggarakan kebijakan di bidang komunikasi dan kehumasan dengan lembaga perangkat – perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, propinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan; Menyelenggarakan kebijakan di bidang informatika dan statistic dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, propinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan; Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian; Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; Mengarahkan dan menialai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Melaksanakan monev dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

2) SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan , hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan,

kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

11

Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi: Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinkominfotik; Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinkominfotik; Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinkominfotik; Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinkominfotik; Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinkominfotik; Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; Penyelenggaraan pengelolaan barangmilik/asset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinkominfotik; Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sekretariat sebagai berikut: Menyusun konsep program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; Melaksanakan koordinasi dengan unitkerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas; Mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; Mengonsek program kerja dan laporan dinas dengan mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan dari bidang – bidang; Menyelia pengelolaan keuangan dinas dengan cara mengerahkan pelaksanaan teknis penyusun anggaran, belanja umum dan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan; Menyusun konsep bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan hukum; Menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan pelayanan pimpinan; Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas

dengan mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana prasarana dan pengadaan serta penghapusan barang inventaris; Menyelia pengelolaan administrasi kepegawaian dinas untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia; Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Sub Bagian Program Dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Komunikasai, Informatika dan Statistik.

Uraian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan, sebagai berikut : Menyiapkan bahan program kerja bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronasi pelaksanaan tugas dinas; Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; Melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola surat masuk, surat keluar, penataan arsip dan dokumen, legalisasi surat, Sistem Informasi Manajemen dinas; Menyiapkan bahan keorganisasian, kehumasan dan hukum dinas dengan menyiapkan bahan analisis dan kajian yang diperlukan dinas; Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dinas dengan menyelia administrasi barang inventaris/asset, barang pakai habis, pemeliharaan sarana prasarana kantor, pengadaan dan penghapusan barang inventaris/asset; Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi presensi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, gaji dan tunjangan, pendidikan, kesejahteraan, disiplin, promosi, mutasi, dan

penatausahaan pegawai; Melaksanakan pengelolaan pension, cuti, daftar nominative pegawai dan daftar urut kepangkatan, penilaian prestasi kerja dan urusan kepegawaian lain; Menfasilitasi pelaksanaan kegiatan pimpinan dalam dan luar kantor dengan menyiapkan administrasi dan sarana prasarana yang diperlukan kepala dinas; Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Uraian tugas Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut : Menyiapkan bahan program kerja bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronasi pelaksanaan tugas dinas; Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; Melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola surat masuk, surat keluar, penataan arsip dan dokumen, legalisasi surat, Sistem Informasi Manajemen dinas; Menyiapkan bahan keorganisasian, kehumasan dan hukum dinas dengan menyiapkan bahan analisis dan kajian yang diperlukan dinas; Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dinas dengan menyelia administrasi barang inventaris/asset, barang pakai habis, pemeliharaan sarana prasarana kantor, pengadaan dan penghapusan barang inventaris/asset; Melaksanakan pengelolaan administrasi

kepegawaian meliputi presensi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, gaji dan tunjangan, pendidikan, kesejahteraan, disiplin, promosi, mutasi, dan penatausahaan pegawai; Melaksanakan pengelolaan pension, cuti, daftar nominative pegawai dan daftar urut kepangkatan, penilaian prestasi kerja dan urusan kepegawaian lain; Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pimpinan dalam dan luar kantor dengan menyiapkan administrasi dan sarana prasarana yang diperlukan kepala dinas; Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

3) BIDANG KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN

Bidang Komunikasi dan kehumasan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang humas dan komunikasi public, pengelolaan informasi dan diseminasi serta pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Komunikasi dan Kehumasan mempunyai fungsi: Pengkoordinasian kegiatan Humas dan Komunikasi Publik di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Pengkoordinasian kegiatan Pengelolaan Informasi dan Diseminasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas Bidang komunikasi dan kehumasan, sebagai berikut : Merumuskan konsep program kerja bidang komunikasi dan kehumasan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronasi pelaksanaan tugas; Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

Menyiapkan bahan, data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang komunikasi dan kehumasan; Menyelenggarakan program kerja bidang komunikasi dan kehumasan yang meliputi program kerja humas dan komunikasi public serta pengelolaan informasi dan desiminasi; Menyelenggarakan penyeliaan pengelolaan pengembangan UPT Radio, pengaturan pengelolaan UPT Radio sesuai dengan kebijakan kepala dinas dan aturan yang berlaku; Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan pada bidang komunikasi dan kehumasan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan; Mengendalikan pelaksanaan di bidang komunikasi dan kehumasan agar sesuai dengan sasaran kerja; Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

SEKSI HUMAS DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Seksi Humas dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kehumasan dan komunikasi publik.

Uraian tugas Seksi Humas dan Komunikasi Publik, sebagai berikut : Merumuskan konsep program kerja seksi humas dan komunikasi publik sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas; Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis Melaksanakan pembinaan kehumasan daerah, koordinasi dan kegiatan pelayanan

kepada wartawan cetak dan elektronik di Kabupaten Brebes, peliputan dan koordinasi dengan organisasi profesi wartawan, kegiatan juru bicara pemerintah Kabupaten Brebes; Melaksanakan kegiatan press tour dan silaturahmi dengan wartawan, kegiatan penyusunan kliping dan sambutan Bupati; Melaksanakan kegiatan pendokumentasian kegiatan Bupati/Wakil Bupati dan lainnya; Melaksanakan kegiatan menghimpun dan penyajian informasi Bupati/Wakil Bupati. Kegiatan koordinasi kehumasan dengan instansi/lembaga pemerintah/swasta baik di dalam maupun di luar daerah; Mengkoordinasikan upaya peningkatan layanan informasi dan komunikasi public dengan masyarakat luas sesuai aturan yang berlaku; Melaksanakan kegiatan peliputan, rilis berita dan informasi dengan menanggapi berita dan informasi yang tidak benar berkaitan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang selanjutnya untuk diluruskan; Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas di bidang kehumasan untuk peningkatan hasil pelaksanaan tugas; Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DESIMINASI.

Seksi pengelolaan Informasi dan Desiminasi mempunyai tugas melakukan penyipian bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan Informasi public, pengembangan kelembagaan komunikasi dan desiminasi informasi.

Uraian tugas Seksi pengelolaan Informasi dan Desiminasi sebagai berikut :
Merumuskan konsep program kerja seksi pengelolaan informasi dan desiminasi public

sebagai pedoman dan acuan melaksanakan tugas. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis. Melaksanakan pengolahan dan pelayanan informasi public, inventarisasi informasi dan penyusunan daftar informasi public. Menghimpun pengaduan masyarakat untuk diteruskan ke badan public terkait. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat, monitoring isu public di media social dan media massa, diseminasi informasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai aturan yang berlaku. Melaksanakan pembinaan kepada radio swasta, radio komunitas dan media cetak / elektronik lainnya. Melaksanakan kegiatan pelayanan komunikasi kepada masyarakat melalui media elektronik yang meliputi radio, televisi, film sesuai aturan yang reportase siaran langsung/publikasi keliling kegiatan pemerintah daerah sesuai aturan yang berlaku. Melaksanakan pengelolaan Radio siaran Pemerintah Daerah atau Lembaga Penyiaran Publik local (RSPD / LPPL), media cetak dan / elektronik lainnya milik daerah. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan pendirian stasiun penyiaran radio, izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan televisi sesuai aturan yang berlaku. Melaksanakan koordinasi teknis dengan OPD / unit kerja yang dapat didukung dalam rangka mensosialisasi kebijakan maupun informasi lainnya. Melaksanakan reportase radio/siaran langsung/publikasi keliling kegiatan pemerintah daerah sesuai aturan yang berlaku. Melaksanakan pengelolaan pengembangan media informasi dan pemberdayaan kelompok social dan/kelompok informasi masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan kelompok lembaga komunikasi social dan/atau kelompok informasi masyarakat (KIM), Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Mitra) dan kelompok pertunjukan rakyat lainnya di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi, bimbingan teknis pada lembaga komunikasi social sesuai aturan yang berlaku. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

4) BIDANG INFORMATIKA DAN STATISTIK

Bidang Informatika dan Statistik mempunyai tugas perumusan konsep dan. Melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang aplikasi telematika dan persandian serta statistik.

Dalam melaksanakan tugasbidang informatika dan Statistik mempunyai fungsi; Pengkoordinasian teknis bidang informatika dan statistic. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi Aplikasi Telematika dan persandian dan seksi Statistik. Pembinaan dan pemberin dukungan administrasi yang meliputi program dan kegiatan seksi Aplikasi telematika dan persandian dan seksi Statistik. Pengkoordinasian dan enyusun peraturan perundang – undangan serta advokasi hukum bidang informatika dan Statistik. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pelaksanaan tugas informatika lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Informatika dan Statistik sebagai berikut: Merumuskan konsep program kerja bidang informatika dan Statistik sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas; Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; Menyelenggarakan program kerja bidang informatika dan Statistik yang meliputi program kerja seksi Aplikasi Telematika dan persandian serta seksi Statistik esuai dengan aturan yang berlakua; Menyelenggarakan operasional pelaksanaan bidang

informatika dan statistic sektoral sesuai aturan yang berlaku; Mengendalikan pelaksanaan di bidang informatika dan statistic agar sesuai dengan sasaran kerja; Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

SEKSI APLIKASI TELEMATIKA DAN PERSANDIAN.

Seksi Aplikasi Telematika dan Persandian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan aplikasi telematika dan persandian;

Uraian tugas Seksi Aplikasi Telematika dan Persandian , sebagai berikut: Merumuskan konsep program kerja seksi aplikasi telematika dan persandian sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas; Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; Melaksanakan kegiatan pengembangan E-Government OPD, kebijakan integrasi data dan Center Kabupaten Brebes; Melaksanakan pengelolaan server tingkat Kabupaten, meliputi pengembangan system informasi management menuju smart city, pengembangan perangkat lunak , perangkat keras, jaringan komunikasi data dan sumber daya manusia; Melaksanakan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur jaringan internet dan internet tingkat Kabupaten; Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian system informasi dan komputerisasi pada organisasi perangkat daerah, kerjasamadalam rangka pengembangan sumber daya manusia bidang teknologi informatika Melaksanakan

kebijakan teknis kegiatan penyelenggaraan dan telekomunikasi serta layanan telekomunikasi kedinasan sesuai aturan yang berlaku; Melaksanakan pelayanan perizinan/rekomendasi zona pembangunan menara telekomunikasi, pengawasan, pengendalian dan penertibkan penyelenggaraan Telekomunikasi yang cakupan areanya pembangunan Menara Telekomunikasi; Menyelenggarakan Warung Telekomunikasi, Warung Seluler atau sejenisnya; Melaksanakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; Melaksanakan pengelolaan persandian meliputi pengawasan, pengendalian dan pengamanan jaringan, data Center, informasi, personil dan dokumen persandian; Melaksanakan pencatatan semua kegiatan persandian, pemrosesan berita sandi baik yang dikirim maupun yang diterima dari propinsi dan pusat sesuai aturan yang berlaku; Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan Teknologi Informasi dan komunikasi kepada masyarakat Menyampaikan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah di capai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

SEKSI STATISTIK

Seksi Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta laporan bidang penyediaan data statistik sektoral;

Uraian tugas seksi Statistik sebagai berikut: Merumuskan konsep program kerja seksi Statistik sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas; Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; Melaksanakan pengumpulan, mengolah data



primer dan data sekunder dari instansi pemerintah, non pemerintah, media cetak/elektronik maupun dari masyarakat; Melaksanakan penyebaran data Statistik kepada instansi pemerintah, instansi non pemerintah atau kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku; Melaksanakan statistik sektoral meliputi Kabupaten Brebes dalam rangka, PDRB, Inflasi, table input, Statistik neraca konsumsi, nilai tukar petani dan neraca konsumsi bahan makanan dan non makanan; Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan sensus dan survey antar sensus penduduk , pertanian dan ekonomi; Melaksanakan kerjasama kajian/analisis hasil sensus penduduk, pembentukan forum statistik Kabupaten; Mengembangkan data/informasi/statistik daerah sesuai aturan yang berlaku; Melaksanaan bombing teknis personal ke Kecamatan / Desa untuk menyusun statistik sektoral tingkat Kecamatan dan desa; Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah di capai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; Menyampaikan saran masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

2.2 Sumber Daya Dinkominfotik

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinkominfotik memiliki segenap sumberdaya untuk mendukung kinerja, sebagai berikut:

A. Sumber Daya Manusia:

Pangkat -Gol Ruang	Eselon	Gender	Pendidikan
Pembina Tk. I - IV/b	II/B	L	S1 HUKUM
Pembina - IV/a	III/A	L	S1 HUKUM



Penata Tk.I - III/d	III/B	L	S1 HUKUM
Penata Tk.I - III/d	III/B	p	S2 Komunikasi
Penata Tk.I - III/d	IV/A	L	S 1 Ekonomi Manajemen
Penata Tk.I - III/d	IV/A	P	S 1 Ekonomi Manajemen
Penata Tk.I - III/d	IV/A	L	STM Teknik Elektronika
Penata Tk.I - III/d	IV/A	L	S 1 Ilmu Pemerintahan
Penata Tk.I - III/d	IV/A	L	STM Mesin
Penata Muda Tk.I - III/b		L	S 1 Ilmu Komunikasi
Penata Tk. I - III /D		L	S1 komputer
Penata Muda Tk.I - III/b		P	SMEA Tata Usaha
Penata Muda Tk.I - III/b		L	LISTRIK
Penata Muda Tk.I - III/b		L	Tata Niaga
Penata Muda Tk.I - III/b		L	SMEA Tata Niaga
Penata Muda Tk.I - III/b		L	IPA
Penata - III/c		L	S 1 Ekonomi
Penata Muda Tk.I - III/b		P	S 1 Manajemen
Penata Muda - III/a		P	S 1 Ilmu Komunikasi
Penata Muda - III/a		L	S 1 Teknik Informatika
Pengatur Tk I - II /d		L	SMA
Pengatur - II/c		L	SMA IPS
Pengatur Tk. I - II/d		L	SMA IPS
Pengatur - II/c		L	SMA IPS
Penata Muda - II/a		L	S 1 Ilmu Pemerintahan
Pengatur - II/c		L	STM Elektronika Komunikasi
Penata Muda - III/a		P	S - 1 Ekonomi
Pengatur - II/c		P	SMA IPS

Pengatur - II/c		L	SMA IPS
Pengatur - II/c		P	SMA
Penata Muda - III/a		L	S - 1 HUKUM
Pengatur Muda - III/a		L	S - 1 HUKUM
Pengatur - II/c		P	SMA IPS
Pengatur - II/c		L	IPS
Pengatur Muda Tk. I - II/b		L	PAKET C
Pengatur Muda Tk. I - II/b		L	SD
Pengatur Muda Tk. I - II/b		L	SMP
Pengatur Muda - II/a		L	SMA
Pengatur Muda Tk. I - II/b		L	SMA
Pengatur - II/c		L	SMA

Dinkominfotik memiliki SDM sejumlah 40 orang PNS , terdiri dari 31 orang laki-laki (77,5%) dan 9 orang perempuan (22,5%), dengan prosentase tingkat pendidikan strata 2 sebanyak 1 orang (02,5%), strata 1 sebanyak 16 orang (40%), SMA sebanyak 21 Orang (52,5%), SMP sebanyak 1 orang (2,5%), SD sebanyak 1 orang (2,5%).

Dari jumlah tersebut memang masih belum optimal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dikarenakan kurangnya tenaga dengan kualifikasi yang spesifik di bidang teknologi komunikasi dan informatika. Terdata di Dinkominfotik Brebes, untuk Ahli Komunikasi dengan Strata 2 hanya 1 orang (0,25%) , strata 1 hanya 2 orang (0,50%), untuk kualifikasi strata 1 komputer hanya 1 orang (0,25%).

Untuk mendukung kinerja Dinkominfotik ada baiknya agar dapat dialokasikan formasi untuk penambahan SDM dengan kualifikasi Ahli Komputer dan Ahli Teknik Komunikasi dan Informatika.

B. Aset Dinas

24

Aset merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo, dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel II. Aset Dinkominfo

No	Aset Dinas	Jumlah	Satuan	Keadaan		
				RB	RR	B
1	Gedung:					
	- Kantor/gedung	1	Unit			1
	- Stasiun Radio	3	Unit			3
2	Kendaraan:					
	- Mobil	5	Unit		1	4
	- Sepeda Motor	14	Unit			14
3	Prasarana Penunjang :					
	- Kamera Shoting	6	Unit		4	2
	- Kamera slot	13	Unit		3	10
	- Pemancar	5	Unit			5
	- Server	3	Unit			3
	- Genset	2	Unit			2
	- Alat studio & Komunikasi	99	Unit		14	85
	- Buku perpustakaan	10	Buku			10
	- buku teknologi informasi & Komunikasi	1	Buku			1

Sejauh ini, dengan ketersediaan aset Dinkominfo diharapkan dapat menunjang kinerja secara optimal. Namun memang dengan keterbatasan aset ini, juga membuat potensi pengembangan pelayanan menjadi terhambat (kurang maksimal).

Pengadaan aset berupa sepeda motor, mobil, server, tempat Server dan comment center mutlak dibutuhkan untuk memberikan cakupan pelayanan yang luas kepada masyarakat dan demi kelancaran tugas – tugas Dinkominfo.



2.3 Kinerja Pelayanan Dinkominfotik

Kinerja pelayanan Dinkominfotik dapat dilihat pada indikator RPJMD 2012 – 2017 sebagai berikut:

Tabel III – Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkominfotik Kabupaten Brebes 2012 – 2017

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Website SKPD (situs)	-	-	-	1	7	8	9	11	1	1	1	9		100 %	14,2 8%	12, 5%	100 %	
	Program Penyiaran RSPD	-	-	-	3	62	65	72	74	6	81	94	97		200 %	130, 6%	144 ,6%	131 %	
	Hotspot wifi area (lokasi)	-	-	-	1	3	4	5	7	1	3	4	7		100 %	100 %	100 %	140 %	
	Penyediaan perangkat pendukung E-Governmen SKPD :	-	-	-	-					-									
	VoiP Communication	-	-	-	0	0	3	4	8	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	
		-	-	-	-					-									
10	Jumlah surat kabar nasional/lokal (media)				92	92	94	100	92	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	
11	Jumlah penyiaran radio/TV local (unit)				16	16	16	16	16	16	14	13	14		100 %	87,5 %	81, 25%	87, 5%	
12	Website milik Pemerintah daerah				1	1	1	1	1	1	1	1	1		100 %	100 %	100 %	100 %	
13	Pameran/Expo				1	1	1	1	2	2	2	2	2		200 %	200 %	200 %	200 %	
	Kegiatan diseminasi informasi Nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi; (pertahun)				3	3	6	12	12	3	3	3	3		100 %	100 %	50%	25%	
	Kegiatan diseminasi informasi Nasional melalui media baru seperti webbsite (media online) (setiap hari)				Seti ap hari	Seti ap hari	Seti ap hari	Seti ap hari	Seti ap hari	Seti ap hari	Seti ap hari	Seti ap hari	Seti ap hari						



Kegiatan diseminasi informasi Nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat (pertahun)				3	3	6	6	12	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	26
Kegiatan dimensi informasi Nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya (pertahun)				3	3	6	12	12	3	3	5	8		100%	100%	83,3%	66,6%	
Kegiatan diseminasi informasi Nasional melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho (pertahun)				1	3	6	12	12	6	50	62	70		600%	166,6%	103,3%	583,3%	
Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan (kelompok)				2	4	4	5	17	6	8	12	17		300%	200%	300%	340%	

Dari tabel diatas, ada beberapa indikator yang sudah tidak lagi relevan untuk dijadikan indikator kinerja Dinkominfotik, yakni yang berhubungan dengan Aplikasi telematika dan teknologi (TI) sedangkan daerah lain sudah sangat maju sedang kabupaten Brebes masih ketinggalan dan jumlah kapasitas satuan sambungan telepon (SST). Pada RPJMD 2017 – 2022 perlu dimasukkan indikator lain pendukung kinerja Dinkominfotik, agar lebih mencerminkan kinerja Dinkominfotik secara keseluruhan, meliputi :

- Jumlah Perangkat Teknologi Informatika SKPD (*e-Government*) yang sekarang ada :
 - o Hotspot area : 5 satuan Titik.
 - o Perangkat teleconference SKPD : 2 satuan Unit.

Dengan indikator baru tersebut kurang mencerminkan kinerja Dinkominfotik selaras dengan visi misi Bupati Brebes terpilih, yakni misi ke empat: Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi infrastruktur, serta Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, perangkat *e-Government* yang mendukung *good corporate governance*.



Kode Rekening	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator / Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Tahun										Keadaan Akhir Masa RPJMD		Keterangan
			2012		2013		2014		2015		2016				
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar														
02.09	DINKOMINFOTIK														
02.09.01.01	DIANAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK														
02.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa														
1.25.1.07.01.01.15.04	Pengadaan alat studio dan komunikasi		77,000,000	74,529,600	80,000,000	78,699,700	115,290,000	106,364,400	39,505,000	33,800,900	4,500,000	4,500,000	316,295,000	297,894,600	
1.25.1.07.01.01.15.07	Pembuatan paket siaran TV, radio dan media cetak lainnya		103,500,000	89,864,291	92,240,000	66,239,700	139,906,000	129,674,900	95,749,000	82,803,600	88,008,000	80,666,400	519,403,000	449,248,891	
	Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media														
1.25.1.07.01.18.01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		100,000,000	89,646,800	95,000,000	84,420,800	79,900,000	75,650,500	79,843,000	76,554,800	80,000,000	77,064,000	434,743,000	403,336,900	
1.25.1.07.01.18.02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		62,240,000	50,015,500	110,010,000	93,026,491	111,559,000	100,164,817	115,240,000	79,337,591	100,065,000	80,902,470	499,114,000	403,446,869	
1.25.1.07.01.18.04	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau		85,000,000	73,562,600	75,000,000	71,172,300	75,000,000	64,976,365	75,000,000	60,705,957	204,500,000	187,737,000	514,500,000	458,154,222	
1.25.1.07.01.16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi														



1.25.1.07.01 .16.02	Pengembangan sistem jaringan komunikasi data		75,000,000	69,597,852	200,000,000	185,849,813	77,000,000	65,922,000	274,772,000	121,453,205	174,196,000	111,632,171	800,968,000	554,455,041		28
1.25.1.07.01 .16.03	Pengembangan sistem aplikasi dan Komputerisasi		75,000,000	74,147,000	172,250,000	166,336,400	309,171,000	132,786,347	70,387,000	34,875,000	23,216,000	15,562,000	650,024,000	423,706,747		
1.25.1.07.0 1.16.04	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Global		37,760,000	37,205,000	74,000,000	71,650,000	124,114,000	51,736,500	51,426,000	17,965,714	28,199,000	15,643,500	315,499,000	194,200,714		
1.25.1.07. 01.17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi															
1.25.1.07.0 1.17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan teknologi informasi		50,000,000	42,268,200	180,000,000	124,067,750	112,787,000	30,120,000	28,516,000	20,958,000	30,000,000	25,446,000	401,303,000	242,859,950		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinkominfo

A. Tantangan Dinkominfo :

Berikut ini adalah berbagai tantangan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo, dari faktor Regulasi, Teknologi, SDM dan Demografi sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang Perda no 2 tahun 2014 tentang Penataan, Pembangunan dan Pengaturan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Brebes perlu segera dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan dan kewenangan yang berlaku.
2. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Pelaksanaan Retribusi Menara Telekomunikasi, sudah diatur di daerah melalui Juknis Kementerian Keuangan , sehingga perlu perubahan Perda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sehingga sampai dengan saat ini masih agak kesulitan melaksanakan tugas pemantauan, pembinaan dan penarikan retribusi menara selular;
3. Pelaksanaan perencanaan, dan pembinaan Radio belum maksimal dikarenakan keterbatasan Anggaran dan peralatan yang ada di 3 Radio milik Pemerintah tidak memenuhi standar;
4. Penerapan teknologi di bidang teknik komunikasi informatika juga belum optimal, dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga sementara ini cakupan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinkominfo masih sebatas pelayanan konvensional dengan penerapan teknologi yang bertahap pembangunannya;
5. Luasnya wilayah Kabupaten Brebes dan besarnya jumlah penduduk menyebabkan Dinkominfo memiliki tanggungjawab yang besar dalam mencukupi kebutuhan Masyarakat di bidang penyediaan sarana prasarana teknik komunikasi

informatika. Tentunya akan lebih optimal manakala hal tersebut didukung dengan kekuatan / ketersediaan anggaran;

6. Tantangan yang terakhir adalah ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan Dinkominfotik. Terkait bahwa ketersediaan SDM hanya dapat dipenuhi dari alokasi CPNS, maka akan lebih baik bila Dinkominfotik mendapat alokasi SDM dari CPNS dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Ahli Komunikasi – Strata I dan Strata 2;
 - b. Ahli Jaringan tehknik Komputer – Diploma III;
 - c. Ahli Desain grafis Komputer – Diploma III dan Strata 1;
 - d. Ahli Teknologi Informatika / Komputer – Strata 1.

B. Peluang dan rencana Dinkominfotik:

Terkait dengan tantangan yang harus dihadapi, Dinkominfotik tetap optimis dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, dengan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Perubahan Perda no 2 tahun 2014 tentang Penataan, Pembangunan dan Pengaturan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Brebes;
2. Perubahan Perda No. 1 tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;
3. Penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Road Map arah dan Pengembangan TIK di Kab.Brebes;
4. Penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Dewan TIK di Kab. Brebes;
5. Penyusunan Peraturan Bupati tentang penggunaan subdomain di brebeskab.go.id;
6. Penyusunan Peraturan Bupati tentsng penggunaan email resmi di brebeskab.go.id;

7. Penyusunan Peraturan Bupati tentang penggunaan media social yang resmi;
8. Pembuatan 1 buah Ruang server yang sesuai standar berguna untuk mengintegrasikan server yang dapat menjamin keamanan infrastruktur dan data center;
9. Penambahan server dan bandwit untuk mendukung pelaksanaan E-government menuju Smart City;
10. Penambahan catu daya listrik dan cadangan listrik, Sehingga server tidak terganggu catu dayanya;
11. Pembuatan Ruang dan Srana infrastruktur untuk melaksanakan Bintek TIK bagi masyarakat ,karena ruang dan sarananyadipakai untuk kebutuhan karyawan yang bertambah;
12. Memiliki Command Center sebagai ruang control pengamatan kondisi wilayah seperti: Arus lalu lintas, kondisi sungai, tempat - tempat sampah dan fasilitas publiklainnya;
13. Penambahan jumlah SDM bidang TIK sebanyak 5 orang;
14. Membuat beberapa aplikasi antara lain: Aplikasi Cell Plan Menara Telekomunikasi untuk seluruh Wilayah Kabupaten Brebes, Aplikasi GIS Kabupaten Brebes (Informasi koordinat dan profil lokasi Potensi Brebes), Surat menyurat online.
15. masyarakat di bidang Informasi Masyarakat terutama lewat Radio maupun lewat Webside sangat dibutuhkan kini dengan sudah diluncurkannya Fasebook, Bupati Dinas kominfotik Brebes, Instagram dinkominfotik brebes dan WA/link di nomor 08164885500 masyarakat dapat mengaksesnya dan juga untuk tingkat Propinsi ada Lapor Gub masyarakat dapat melaporkannya langsung kejadian – kejadian yang merugikan masyarakat kepada Gubernur.
16. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran Dinas komunikasi, informatika dan Statistik di Kabupaten Brebes, maka Dinkominfotik mencoba menyusun skala prioritas penerapan teknologi, dengan harapan pengadaannya dapat dilaksanakan

bertahap dengan tujuan akhir tetap untuk memenuhi target kinerja melayani masyarakat Kabupaten Brebes. Hal-hal yang sudah mulai diaplikasikan dengan teknologi komunikasi dan informatika sejauh ini antara lain adalah:

- a. Instalasi Traffic IP Camera pada beberapa lokasi;
- b. Penyediaan Hot Spot / Wi-Fi area pada beberapa lokasi;
- c. Perhitungan pilkada metode real-count;
- d. Media centre pada periode waktu angkutan lebaran.
- e. Ruang khusus comment center yang memadai
- f. Tempat server

17. Luasnya wilayah Kabupaten Brebes tidak menjadikan halangan bagi Dinkominfo untuk tetap melaksanakan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Berbagai upaya untuk memudahkan pelayanan informasi di kabupaten brebes khususnya Dinkominfo menyelenggarakan kegiatan penyiaran di tiga lokasi penyebarluasan Informasi:

- Wilayah Pantura: Radio Singosari FM yang berlokasi di Brebes
- Wilayah Tengah: Radio Singosari News yang berlokasi di Ketanggungan
- Wilayah Selatan: Singosari Top FM yang berlokasi di Paguyangan

Juga untuk menyebarluaskan informasi pembangunan melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berada di desa/kelurahan di Kabupaten Brebes. Informasi disajikan dalam bentuk topdown atau sebaliknya.

18. Melaksanakan penyebaran informasi pembangunan dan pemerintahan menggunakan metode saluran komunikasi melalui: siaran radio yang ada di beberapa lokasi; FK-Metro (Forum Komunikasi Media Tradisional); melalui Kelompok Informasi Masyarakat; Publikasi/ dialog; melalui Media Sosial; Dialog Interaktif dan website.



19. Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten Brebes yang mudah diakses dari manapun oleh masyarakat Kabupaten Brebes ataupun masyarakat lainnya yang membutuhkan informasi mengenai Kabupaten Brebes;
20. Penyediaan rangka baliho di beberapa titik strategis di dalam wilayah Kabupaten Brebes yang siap dipasang baliho berisi informasi pembangunan dan Pemerintahan Daerah;
21. Pemutaran film terjadwal bergilir di wilayah Kabupaten Brebes dengan tujuan mengedukasi masyarakat, disamping menginformasikan pembangunan dan Pemerintahan Daerah.
22. Kelangkaan SDM yang memiliki kualifikasi di bidang Kominfo memang masih kesulitan untuk meningkatkan kecakapan dan kapasitas di bidangnya masing-masing, karena memang belum ada kesempatan atau tawaran yang sesuai. Namun demikian, Dinkominfotik tetap berusaha mengoptimalkan SDM yang ada untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinkominfotik keseluruhan dengan tetap menunggu alokasi SDM berkualifikasi dari CPNS Daerah.

BAB III.

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan adalah suatu bentuk dari kesenjangan antara kondisi yang seharusnya terjadi secara ideal dengan kondisi yang terjadi secara sesungguhnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Berikut ini adalah beberapa permasalahan menonjol yang timbul dalam pelaksanaan kinerja Dinkominfo Kabupaten Brebes:

A. Kesekretariatan:

1. Sub Bagian Program dan Keuangan:

Permasalahan paling menonjol pada sub bagian Program dan keuangan adalah bahwa dalam proses pelaporan pekerjaan sangat sulit untuk mendapat progress report secara real-time dari masing-masing pengampu kegiatan di tiap Bidang. Hal ini disebabkan karena kontrol yang masih kurang dari masing-masing seksi kepada pelaksana kegiatan baik untuk kegiatan yang sifatnya di-pihak ketiga-kan maupun yang sifatnya swakelola. Hal ini menyulitkan sehingga dalam membuat laporan bulanan terkadang capaian realisasi fisik tidak dapat diketahui secara pasti, walaupun capaian realisasi keuangan dapat diketahui dari catatan keuangan.

Sedangkan kegiatan yang berjalan terkadang tidak sesuai dengan jadwal anggaran kas yang telah ditentukan. Hal ini membuat kesulitan manakala terjadi penumpukan penyerapan APBD pada triwulan akhir, sehingga banyak terjadi penumpukan pekerjaan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

Permasalahan paling menonjol pada sub bagian Umum dan Kepegawaian adalah bahwa pendataan terhadap asset Dinkominfo secara utuh dan pengarsipan kepegawaian dalam bentuk pengolahan data secara elektronik masih belum dapat

diwujudkan. Hal ini mengakibatkan kinerja tidak efisien dari segi waktu, karena pengarsipan masih dilakukan secara manual sehingga aksesibilitas terhadap data belum optimal.

B. Bidang Komunikasi dan Kehumasan:

1. Seksi Humas dan Komunikasi Publik:

Permasalahan yang menonjol di seksi humas dan komunikasi public adalah kurangnya jumlah dan petugas Humas yang mumpuni di bidang kehumasan, personil yang ada sekarang sangat kurang dan terbatasnya akses informatika untuk menunjang fungsi kehumasan serta kurangnya pelatihan kehumasan sehingga pelayanan kehumasan terhadap masyarakat tidak optimal dan mobilitasnya sangat kurang, Humas butuh tenaga yang trampil, gesit dan mobilitas yang tinggi untuk menjawab tantangan terhadap pelayanan masyarakat.

2. Seksi Pengelolaan Informasi dan Desiminasi:

Permasalahan yang menonjol di seksi pengelolaan informasi dan desiminasi belum terbentuknya Kelompok Informasi masyarakat (KIM) di setiap desa sehingga diseminasi informasi pembangunan yang di sampaikan belum merata ke semua desa hanya 17 desa di 17 kecamatan.

Tidak dimanfaatkannya FK-Metra (Forum Komunikasi Media Tradisional) oleh OPD sebagai media untuk menyebarluaskan informasi pembangunan.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menyebabkan penyiaran radio semakin ditinggalkan oleh pendengarnya, Dengan demikian penyebarluasan informasi melalui radio berkurang.

Terbatasnya papan informasi yang ada hanya 18 buah se Kabupaten Brebes itupun 4 diantaranya kondisinya rusak.

Belum tersedianya daftar informasi public sehingga permintaan pemohon informasi dari masyarakat tidak terlayani dengan baik dan cepat.

C. Bidang Informatika dan Statistik:

1. Seksi Aptel dan Persandian:

- Seksi Aptel dan Persandian permasalahannya belum dapat melaksanakan kinerjanya sebagai Pembina dan pengatur di bidang telekomunikasi dan informatika, terkait belum di tetapkannya Peraturan Perundang-undangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati untuk mendasari kinerja di bidang pengaturan dan penarikan retribusi bagi semua sektor komunikasi dan informatika, seperti contohnya adalah pengaturan dan penarikan retribusi bagi tower provider selular yang ada di Kabupaten Brebes di samping itu sumber daya manusia yang berkualifikasi Ahli Komunikasi dan Informatika saat ini hanya ada 2 orang, sehingga segala hal terkait perencanaan, pengelolaan sampai dengan pemeliharaan bergantung pada orang – orang tersebut. Hal ini tentunya membuat seksi Aptel dan persandian tidak dapat membuat perencanaan sampai dengan pelaksanaan program kerja dengan optimal, sehingga akan sangat sulit untuk mewujudkan e-Government dan aplikasi perangkat Information Technology di Kabupaten Brebes dalam waktu singkat di bidang persandian juga sangat kurang sumber daya manusia hanya 1 personil yang sudah bersertifikat Sandiman di Kabupaten Brebes.

2. Seksi Statistik:

Permasalahan di seksi Statistik, ini seksi baru yang di adopsi dari Baperlitbangda sehingga dari SDM (sumber daya manusia) sampai anggaran sangat terbatas menyebabkan produk yang dihasilkan Brebes dalam data dan Brebes dalam angka kurang maksimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinkominfotik Kabupaten Brebes tentunya harus sesuai dengan Visi Misi Bupati Kabupaten Brebes terpilih, sehingga nafas kegiatan yang dilaksanakan adalah merupakan nafas yang sama dengan yang dicita-citakan/ janji – janji

waktu kampanye oleh Bupati Kepala Daerah untuk menyejahterakan Masyarakat Kabupaten Brebes. Berikut ini adalah uraian Visi Misi Bupati Brebes ibu Hj. Idza Priyanti, SE. :

A. Visi Bupati Brebes adalah:

MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN.

B. Misi untuk mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai – nilai Ketuhanan yang maha esamelaui Pendidikan dan Kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya lingkungan hidup dan prinsip – prinsip Pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai rencana tata ruang dan ramah lingkungan;
5. Memantapkan tata kelola Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesetaraan dan berkeadilan gender serta pemenuhan hak anak, dalam partisipasi pembangunan dan mewujudkan perlindungan sosial.

Dari keenam misi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinkominfo dapat berperan untuk mensukseskan program Bupati Brebes melalui misi ke 4 yang di jabarkan:

- Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan memelihara stabilitas keamanan daerah yang bermuara pada pemerintahan yang bersih dan berwibawa:

Dinkominfo sebagai kepanjangan tangan Bupati Brebes untuk melakukan pembinaan di bidang Komunikasi dan informasi dapat mewujudkan terciptanya kondisi

pemerintahan yang bersih dan berwibawa sekaligus ketertiban daerah melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Terciptanya masyarakat brebes yang paham akan komunikasi dan teknologi informasi;
 2. Terciptanya kondisi informatif edukatif bagi masyarakat yang ada jauh dari pusat pemerintahan untuk mengetahui program Pemerintah dalam membangun Kabupaten Brebes melalui sosialisasi terjadwal bergilir ke semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Brebes yang dikemas dalam bentuk penyediaan hiburan pemutaran film dan informasi pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi positif masyarakat terutama yang jauh dari pusat pemerintahan agar tidak mudah terpecah-belah dan terhasut oleh isu-isu negatif tentang pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.
- Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat:

Dinkominfotik sebagai kepanjangan tangan Bupati Brebes untuk melakukan pembinaan di bidang Komunikasi dan informatika dapat mewujudkan terciptanya kondisi meningkatnya ekonomi kerakyatan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi dan revitalisasi jaringan komunikasi dan teknologi informatika, pengadaan server canggih guna menunjang komunikasi dan informasi ke wilayah desa se kabupaten Brebes sehingga tiap desa dapat terlayani informasi dengan dan cepat;
2. Penyediaan hot spot WiFi area sampai ke tingkat Desa untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi terutama yang berhubungan dengan kegiatan meningkatkan potensi Desa untuk percepatan pembangunan dan peningkatan taraf hidup melalui pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, wisata maupun potensi lainnya, dilengkapi dengan penyediaan papan informasi bagi masyarakat pedesaan yang ditempatkan pada titik strategis tempat berkumpulnya warga berisikan hal-hal yang dapat mendukung optimalisasi potensi daerah.

- Meningkatkan kesejahteraan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan Dinkominfo sebagai kepanjangan tangan Bupati Brebes untuk melakukan pembinaan di bidang Komunikasi dan informasi dapat mewujudkan terciptanya kondisi meningkatnya kesejahteraan gender dan meningkatkan kapasitas kaum perempuan, disertai pemenuhan kebutuhan dan hak anak melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan mengenai Teknik Komunikasi dan Informatika bagi kaum perempuan yang bekerja sebagai SDM di bidang Pemerintahan baik tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten;
2. Mensosialisasikan hal-hal terkait kesetaraan gender dan peningkatan potensi kaum perempuan tentang partisipasinya dalam pembangunan melalui siaran radio, media cetak, media website maupun secara langsung, sehingga kaum perempuan bahkan yang ada di lingkungan yang jauh dari pusat pemerintahan dapat tergugah untuk turut berperanserta dalam membangun Kabupaten Brebes melalui peningkatan potensi yang dimiliki;

3.3. Telaahan Visi Misi , Kementerian Kominfo dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

A. Visi Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika:

Visi:

Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi:

1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi.
2. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur pos, komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.

3. Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan industri aplikasi.
4. Mengembangkan standardisasi dan sertifikasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif di bidang industri komunikasi dan informatika.
5. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat.
6. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah pembangunan bangsa.
7. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka menciptakan kemandirian dan daya saing bidang komunikasi dan informatika.
8. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme.
9. Meningkatkan peran serta aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa dan negara.
10. Meningkatkan kualitas pengawasan menuju terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance).

B. Keselarasan Visi Misi Kementerian Kominfo terhadap Renstra Dinkominfotik Kabupaten Brebes:

Uraian pada poin sebelumnya menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun Renstra Dinkominfotik 2017 – 2022 dengan menyoroti pada menjelaskan faktor penghambat dan pendorong faktor pelayanan SKPD dilihat dari sasaran jangka menengah Renstra SKPD provinsi dan visi misi dari Kementerian terkait.

Visi misi dari Kementerian Kominfo memang sebaiknya menjadi pedoman dalam menyusun renstra Dinkominfotik Brebes agar kegiatan nantinya tidak

melenceng dari sasarannya. Terkait dengan renstra Provinsi Jawa Tengah , walaupun tidak semua yang tercantum dalam uraian urusan wajib komunikasi dan informatika dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten, namun tetap saja dapat dijadikan pedoman secara garis besar agar tercipta keselarasan antara program kerja antara vertical dengan dan Kabupaten.

3.4. Penentuan Isu – isu Strategis

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Isu strategis adalah kondisi yang dampaknya signifikan bagi daerah, bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa mendatang. Terkait dengan hal tersebut, berikut ini adalah isu – isu strategis yang diangkat oleh Dinkominfo Kabupaten Brebes:

- A. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku saling menghormati sesama pengguna media sosial sehingga menimbulkan isu sara, kekerasan dan berita bohong;
- B. Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tersedianya sarana prasarana komunikasi, informasi yang efektif dan efisien;
- C. Rendahnya aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap keterbukaan informasi global karena kurangnya sosialisasi / pelatihan tentang internet dan teknologi komunikasi dan informatika serta keterbatasan konektivitas jaringan;

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinkominfotik

A. Tujuan Jangka Menengah Dinkominfotik:

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika melalui pemberian informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat informatif dan edukatif;
2. Melaksanakan manajemen komunikasi dan informasi baik pada kawasan perkotaan maupun perdesaan guna meningkatkan potensi daerah dengan perbaikan kinerja komunikasi dan informasi;
3. Memberikan sarana prasarana terbaik di bidang Komunikasi dan Informatika untuk melayani masyarakat;
4. Menyediakan sarana prasarana pendukung e-Government bagi seluruh SKPD di Kabupaten Brebes agar dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

B. Sasaran Jangka Menengah Dinkominfotik:

Untuk menjabarkan tujuan dari Dinkominfotik, berikut ini adalah sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu menengah:

1. Tersedianya tempat server dan commen server yang memadai sehingga memudahkan kepala daerah untuk berkomunikasi dengan masyarakat;
2. Tersedianya tempat server yang memadai untuk kenyamanan perangkat/peralatan informasi ;
3. Tersedianya perangkat pendukung siaran berbasis Teknologi Kehumasan, komunikasi dan perangkat radio di 3 lokasi RSPD yang dapat menjangkau segenap penjuru Kabupaten Brebes (3 lokasi);



4. Tersedianya rangka baliho dan papan informasi yang dipasang di lokasi-lokasi strategis atau tempat keramaian guna media informasi bagi masyarakat (100 lokasi);
5. Terbangunnya gedung kantor pelayanan Dinkominfotik, tempat server, comment center, radio Ketanggungan dan radio Paguyangan (4 lokasi);
6. Terpasangnya system e-Government SKPD (20 SKDP);
7. Terlatihnya SDM di bidang Komunikasi dan Informatika (30 orang).



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategis Dan Kebijakan Dinkominfotik

A. Strategi Dinkominfotik:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementrian Dalam Negri dan Kementrian lainnya diimbangi dengan koordinasi tingkat provinsi ke SKPD terkait untuk menggali informasi dan kerjasama terkait pembangunan Kabupaten Brebes melalui sector Komunikasi dan Informatika;
2. Mengadakan kemitraan dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendidik dan melatih SDM Dinkominfotik Bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Mengadakan studi banding dalam hal pengembangan bidang pelayanan public pada daerah kabupaten/ kota yang sudah lebih dulu mencapai tingkat pelayanan yang lebih baik, dari sisi penyediaan regulasi, tata kelola pelayanan danhal lainnya;
4. Menjalin kemitraan dengan radio swasta, operator seluler dan media cetak, untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Komunikasi dan Informatika.



BAB VI.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KABUPATEN BREBES

TAHUN 2017 – 2022

Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasa ran	Indik ator Sasar an	Kode	Progra m	Indik ator Progr am (Outc ome)	Kegiata n	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capai an Pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerj a Pada Akhir Period e Renstr a Perang kat Daerah		Unit Kerja Pera ngkat Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lo ka si
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Ta rge t	R p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan pelayanan pemerintahan daerah yang proporsional berbasis teknologi	Persentase Perangkat Daerah mengintegrasikan Teknologi Informasi								1.79	2		5		10		20		30					



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
gi informatika																							
		Penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi	Peringkat E-Government (PEGL) Tingkat Provinsi (Rangking)						30	30		30		29		29		28					
			ISO Sistem Keamanan Informasi															1					



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	47
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			Peringkat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik						13	13		12		11		10		10		10				
					Program Komunikasi dan Kehumasan							5,895,000,000		5,137,500,000		5,366,500,000		5,371,500,000						
						Persentase Permohonan Informasi yang di tindak			100	100		100		100		100		100		100				



Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasa ran	Indik ator Sasar an	Kode	Progra m	Indik ator Progr am (Outc ome)	Kegiata n	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capai an Pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondis i Kinerj a Pada Akhir Period e Renstr a Perang kat Daerah		Unit Kerja Pera ngkat Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lo ka si	48
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
						lanjuti																		
						Cakup an Kelo mpok Infor masi Masya rakat (KIM)			11.49	12.5		14.31		19.37		24.92		29.97						
							Kegiata n Humas dan Komuni kasi Publik	Jumlah Kemitraan Antara Pemerinta h Kabupaten Dengan Media Masa (MoU)		10		15	300,00 0,000	20	400,00 0,000	20	400,00 0,000	20	400,00 0,000					



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	49
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
								Jumlah Publikasi terkait Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Brebes (buah)				100	800,000,000	100	900,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000					
								Jumlah Publikasi Kegiatan Pemerintahan (buah)				240	1,600,000,000	240	1,500,000,000	240	1,800,000,000	240	1,800,000,000					
								Jumlah Jurnalis Bersertifikat Profesi Jurnalis (orang)				0	0	50	120,000,000	0	0	0	0					



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	50
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
								Terbentuknya <i>Bakohumas</i> kab Brebes (Tim)				80	75,000,000	80	75,000,000	80	75,000,000	80	75,000,000					
								Jumlah Masyarakat Mendapat Sertifikat Pelatihan Jurnalistik (orang)				100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000					
								Jumlah Aparatur Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Kehumasan (orang)				2	10,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000					



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstrang Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								Jenis Dokumen Laporan Evaluasi Kehumasan (Dokumen)				0	0	1	100,000,000	0	0	0	0				
								Jenis Dokumentasi Internal Kegiatan Pemerintah (Foto, Video, Rekaman Suara) (Jenis)				300	200,000,000	300	200,000,000	300	200,000,000	300	200,000,000				
								Jumlah Surat kabar yang tersebar (eksemplar)				2000	10,000,000	2500	12,500,000	2500	12,500,000	2500	12,500,000				



Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasa ran	Indik ator Sasar an	Kode	Progra m	Indik ator Progr am (Outc ome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capai an Pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondis i Kinerj a Pada Akhir Period e Renstr a Perang kat Daerah		Unit Kerja Pera ngkat Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lo ka si
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								Jumlah tabloid Berita berhias yang diterbitkan (eksempla r)				1200 0	80,000 ,000	1200 0	80,000 ,000	1200 0	100,00 0,000	1200 0	100,00 0,000				
								Jumlah Cinderam ata Khas Daerah yang Tercipta (buah)				0	0	1	60,000 ,000	0	0	0	0				
								jumlah Videotron (unit)				1	1,300, 000,00 0	0	0	0	0	0	0				
								jumlah Buku tokoh brebes (Eksempla r)				0	0	100	30,000 ,000	0	0	100	0				



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstrana Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	53
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
								Jumlah Sambutan Bupati yang disusun (Buah)				360	90,000,000	400	100,000,000	400	100,000,000	400	100,000,000					
							Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Diseminasi	Target Pendapatan Penyiaran Radio (Rupiah)		185,000,000	185,000,000	185,000,000	185,000,000	185,000,000	185,000,000	190,000,000	190,000,000	195,000,000	190,000,000					
								Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Radio dan Televisi (Dokumen)				12 dok	15,000,000	12 dok	17,000,000	12 dok	19,000,000	12 dok	19,000,000					



Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasa ran	Indik ator Sasar an	Kode	Progra m	Indik ator Progr am (Outc ome)	Kegiata n	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capai an Pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerj a Pada Akhir Period e Renstr a Perang kat Daerah		Unit Kerja Pera ngkat Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lo ka si
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Ta rge t	R p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								Terbentuk nya Kelompok Informasi Masyarak at (KIM) (Kelompo k)				10 Kim	40,000 ,000	15 Kim	45,000 ,000	15 kim	50,000 ,000	15 kim	55,000 ,000				
								Jumlah Petugas KIM bersertifka t (orang)				30 orang	10,000 ,000	30 orang	13,000 ,000	30 orang	15,000 ,000	30 orang	15,000 ,000				
								Jumlah Kelompok Seni yang Terlibat dalam Penyebarl uasan Informasi Pembangu nan Daerah (Kelompo k)				2 kelo mpok	100,00 0,000	3 kelo mpok	125,00 0,000	4 kelo mpok	150,00 0,000	5 kelo mpok	150,00 0,000				



Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasa ran	Indik ator Sasar an	Kode	Progra m	Indik ator Progr am (Outc ome)	Kegiata n	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capai an Pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondis i Kinerj a Pada Akhir Period e Renstr a Perang kat Daerah		Unit Kerja Pera ngkat Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lo ka si
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Ta rge t	R p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								Jumlah Jenis Media Publikasi Informasi Penyeleng garaan Pemerinta han (Mobil Keliling, Spanduk, Baliho, Runing Text, Radio,We bsite)(Bua h)		160 buah	234,15 0,000	200 buah	900,00 0,000	250 buah	950,00 0,000	250 buah	1,000, 000,00 0	300 buah	1,000, 000,00 0				



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstran Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								Dokumen Laporan Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan (Dokumen)				1 dok	25,000,000	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000				
								Jumlah Permintaan Data Informasi Publik yang diproses (Dokumen)				32 dok	50,000,000	32 dok	50,000,000	32 dok	60,000,000	50 dok	60,000,000				
								Jumlah Petugas Admin PPID yang bersertifik				35 orang	25,000,000	35 orang	30,000,000	35 orang	40,000,000	35 orang	40,000,000				



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								at (orang)															
								Jumlah Petugas PPID Desa /Kel yang bersertifikat (orang)				30 orang	25,000,000	50 orang	30,000,000	50 orang	40,000,000	50 orang	40,000,000				
					Program Informatika dan Statistik								4.775.000.000		4.114.000.000		4.540.000.000		5.340.000.000				
						Dokumen Master Plan TIK Kab. Brebes (Dokumen)				1										1			



Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasa ran	Indik ator Sasar an	Kode	Progra m	Indik ator Progr am (Outc ome)	Kegiata n	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capai an Pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerj a Pada Akhir Period e Renstr a Perang kat Daerah		Unit Kerja Pera ngkat Daerah Pena nggu ng Jawa b	Lo ka si	58
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
						Terse dianya Single Data Kabup aten												1		1				
						Terse dianya Buku Brebe s dalam Data				1		1		1		1		1		1				
						Terse dianya Buku PDRB Kabup aten Brebe s																		
						Jumla h Sandi man (orang)			1			2		3		4		5		5				



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						Persentase Peringkat Daerah memiliki website (%)			35.71	35.71		40		35.71		45		50					
						Persentase Peningkatan Kunjungan Website						20		20		20		20					
							Kegiatan Aplikasi Telematika dan Persandian																



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	60	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24
								Jumlah kunjungan website	10000	20000		24000		28800		34560		41472						
								Perbup tentang Kebijakan TIK Kabupaten Brebes (Perbup)	-	1		4	200,000,000	-		-		-						
								Data Center			408,318,000		3,310,000,000	1	2,455,000,000		2,520,000,000		2,520,000,000					
								Jumlah Taman Hotspot	5			10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	45				
								Jumlah Backbone Relay Tingkat Kecamatan	-			10	200,000,000	7	140,000,000	-		-		17				



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstran Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
								Peningkatan Bandwith (Mbps)	10	15	132,000,000	100	400,000,000	200	800,000,000	400	1,200,000,000	500	2,000,000,000	500				
								Jumlah Aparatur dan masyarakat mendapatkan sertifikat pelatihan Komputer/IT (orang)	20	20	25,920,000	25	135,000,000	25	140,000,000	25	145,000,000	25	145,000,000					
								Jumlah Laporan Layanan Informasi dan Persandi (buah)	10	10	55,000,000	10	130,000,000	10	179,000,000	10	225,000,000	10	225,000,000					



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	62
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
							Kegiatan Statistik Daerah	Jenis Buku Informasi Pembangunan Daerah (BDD, BS,PP,IHK dan Inflasi)(Buku)	345	350	103,357,000	365	300,000,000	365	300,000,000	365	350,000,000	365	350,000,000					
				1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor																		



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				1.1			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)		1.114	4.125.000	1,114	3,000,500	900	4,500,000	1.000	5.400.000	1.000	6.480.000				
				1.2			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)		4	197.131.000	4	340.805.000	4	200.000.000	4	240.000	4	288.000.000				
				1.7			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Tersedia (orang)		3	29.464.000	5	77.150.000	5	82.500.000	5	99.000.000	5	118.800.000				
				1.8			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat Kebersihan Tersedia (Jenis)		25	5.000.000	30	9.000.000	30	15.000.000	30	18.000.000	30	21.600.000				



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				1.9			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)		18	7.000.000	18	7.000.000	18	20.000.000	20	24.000.000	20	28.800.000				
				1.10			Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)		20	9.000.000	18	21.704.000	30	50.000.000	35	60.000.000	35	72.000.000				
				1.11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia (Jenis)		0	0	1	10.200.000	4	20.500.000	5	24.600.000	5	29.520.000				



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstrak Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				1.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)		4	4.500.000	4	5.000.000	10	7.000.000	12	8.400.000	12	10.080.000				
				1.13			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)		26	2.605.789.000	4	35.788.000	10	70.000.000	12	84.000.000	12	100.800.000				
				1.14			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)		0	0	0	0	5	20.000.000	8	24.000.000	8	28.800.000				
				1.15			Penyediaan bahan bacaan	Jenis Bahan Bacaan dan		1	11.960.000	12	4.960.000	15	15.000.000	17	18.000.000	17	21.600.000				



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstran Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
							dan peraturan perundang-undangan	Perundang-undangan Tersedia (Jenis)															
				1.17			Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makanan Minum Tersedia (Jenis)		4	18.315.000	12	21.315.000	15	50.000.000	17	60.000.000	17	72.000.000				
				1.18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)		12	79.000.000	12	79.000.000	15	100.000.000	17	120.000.000	17	144.000.000				



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstrana Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				1.19			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)		12	47.984.000	12	47.984.000	15	60.000.000	17	72.000.000	17	86.400.000				
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)																	
				2.5			pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)				0	0	5	100.000.000	6	120.000.000	6	144.000.000				



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstran Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				2.7			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)				0	0	10	200.000.000	10	240.000.000	10	288.000.000				
				2.9			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)				0	0	10	200.000.000	10	240.000.000	10	288.000.000				
				2.10			Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)				0	0	10	200.000.000	10	240.000.000	10	288.000.000				
				2.13			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)		2	130.011.000	0	0	1	55.000.000	1	66.000.000	1	79.200.000				



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				2.15			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)		21	89.375.000	21	40.875.000	21	100.000.000	21	120.000.000	21	144.000.000				
				2.19			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)		4	31.256.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				2.24			Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)				0	0	5	20.000.000	5	24.000.000	5	28.800.000				



Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasa ran	Indik ator Sasar an	Kode	Progra m	Indik ator Progr am (Outc ome)	Kegiata n	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capai an Pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerj a Pada Akhir Period e Renstr a Perang kat Daerah		Unit Kerja Pera ngkat Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lo ka si	70
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Ta rge t	R p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				3	Progra m pening katan disipli n aparatur	Perse ntase Keha diran Pega wai (%)																		
				3. 2			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perleng kapanya (Stel)	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengka panya (Stel)		66	15.840 .000	0	0	61	50.000 .000	61	60.000 .000	61	72.000 .000					
				3. 6			Pengada an Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)				66	8.165. 000	61	30.000 .000	61	36.000 .000	61	43.200 .000					
				5	Progra m Pening katan Kapasi	Perse ntase Pega wai Berko																		



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstran Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					tas Sumber Daya Aparatur	petensi (%)																	
				5.1			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/ Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		1	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	12.000.000	4	14.400.000				
				6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Perseentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersed																	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	72
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					dan keuangan	ia (%)																		
				6.1			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, sakip, evaluasi rkp) (jenis)		5	2.036.000	2	2.036.000	2	5.000.000	2	6.000.000	2	7.200.000					
				6.2			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)		6	2.036.000	7	2.036.000	7	5.000.000	7	6.000.000	7	7.200.000					



Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasa ran	Indik ator Sasar an	Kode	Progra m	Indik ator Progr am (Outc ome)	Kegiata n	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capai an Pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondis i Kinerj a Pada Akhir Period e Renstr a Perang kat Daerah		Unit Kerja Pera ngkat Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lo ka si
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Ta rge t	R p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				6.5			Penyusu nan dokume n perenca naan, dan monitori ng	Jenis Dokumen perencanaan dan monitorin g (Jenis)		5	2.036.000	8	2.036.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	7.200.000				

**BAB VII****INDIKATOR KINERJA DINKOMINFOTIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

TABEL V
INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2017 – 2022

No.	Bidang Urusan / Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)	Kondisi Kinerja Pada Tahun Peralihan (2023)
			2018	2019	2020	2021	2022		
1	Peningkatan Anugerah Ke-Terbukaan Informasi Publik -	13	13	12	11	10	10	10	10
2	Peringkat E-Goverman (PEGI) Tingkat Propinsi (ranking) -	30	30	30	30	30	29	29	29
3	Tersedianya single data (ada / tidak ada)	-	-	-	-	-	ada	ada	Ada
4	Tersedianya buku Brebes Dalam angka	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Tersedianya buku (PDRB) Kabupaten		ada	ada	ada	ada	ada	ada	



No.	Bidang Urusan / Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)	Kondisi Kinerja Pada Tahun Peralihan (2023)
			2018	2019	2020	2021	2022		
	Brebes . (ada / tidak ada)								
6	Tersampainya informasi persandian di Kab.Brebes dengan aman dan cepat		ada	ada	ada	ada	ada	ada	



BAB VIII.

PENUTUP

Demikian rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2017 – 2022 kami buat, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami sebagai kepanjangan tangan dari Bupati Brebes, sejalan dengan rencana strategis Provinsi Jawa Tengah serta turut mewujudkan visi – misi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan tugas – tugas tersebut yang direncanakan akan dimulai pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2022 kami maksudkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dari sektor komunikasi dan informatika, sejalan dengan nafas enam pilar visi – misi Bupati Brebes melalui upaya untuk Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik yang bermuara pada pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan, Meningkatkan kesejahteraan gender dan pemenuhan hak anak, dan Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai rencana tata ruang yang ramah lingkungan.

Adapun terkait dengan masa peralihan yaitu pada Tahun Anggaran 2022 maka diharapkan dapat menjadi Tahun Penutup yang sudah kami sinergikan dengan periode Tahun Anggaran 2017 – 2022, untuk menyempurnakan pelaksanaan program kerja Dinkominfo.

Pada akhirnya, dengan disusunnya rencana strategis ini dimaksudkan agar perencanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat lebih terarah, terintegrasi, menyeluruh dan dapat terukur tingkat capaian kegiatannya.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BREBES**

J O H A R I, S.H.
Pembina Tk. I.
NIP. 19610828 198303 1 013